



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD SYAFII**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)**
3. NHK : **893714**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 286 m2/500 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 4.007 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 589.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER PRADO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, NISSAN JUKE Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



3. MOTOR, YAMAHA 4SP BISON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000

4. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 150.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.569.778.858

F. HARTA LAINNYA

Rp. 210.000.000

Sub Total

Rp. 8.269.278.858

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.269.278.858

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.